



Inspektorat Utama

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT UTAMA 2024



+62-21 80871567



Gedung Praja Gupta
Jl. M.T. Haryono No. 11
Cawang - Jakarta Timur



www.bnn.go.id/ittama



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

INSPEKTORAT UTAMA BNN

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama BNN dalam mengawal akuntabilitas kinerja di lingkungan BNN selama tahun 2024.

Laporan kinerja ini memuat capaian program, kegiatan, dan hasil pengawasan yang telah dilakukan selama tahun 2024. Sebagai institusi yang berkomitmen pada tata kelola pemerintahan yang baik, Inspektorat Utama terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Kami menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama yang baik dari seluruh pihak terkait, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Badan Narkotika Nasional, mitra kerja, dan pemangku kepentingan atas sinergi dan kontribusi yang diberikan selama tahun 2024.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan untuk evaluasi dan perbaikan kinerja di masa mendatang, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas pengawasan dan pelaksanaan tugas Inspektorat Utama.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang capaian dan kontribusi kami dalam mendukung pelaksanaan tugas BNN secara keseluruhan.

Jakarta, Januari 2025
Inspektur Utama BNN

ttd.

Paraf:

1. Konseptor/Katim Sun :
2. Arsiparis Muda :
3. Kabag TU :
4. Inspektur I :
5. Inspektur II :
6. Inspektur III/Perevisi I :
7. Irwasriksus :
8. Auditor Utama :

Drs. Wahyono, M.H., CFrA., CGCAE

Kami menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama yang baik dari seluruh pihak terkait, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Badan Narkotika Nasional, mitra kerja, dan pemangku kepentingan atas sinergi dan kontribusi yang diberikan selama tahun 2024.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan untuk evaluasi dan perbaikan kinerja di masa mendatang, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas pengawasan dan pelaksanaan tugas Inspektorat Utama.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang capaian dan kontribusi kami dalam mendukung pelaksanaan tugas BNN secara keseluruhan.

Jakarta, Januari 2025

Inspektur Utama BNN

ttd.

Drs. Wahyono, M.H., CFrA., CGCAE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR GRAFIK	6
LINI MASA	7
IKHTISAR EKSEKUTIF	9
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	10
B. Dasar Hukum	13
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi	14
D. Sistematika Penyajian	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	17
B. Rencana Kerja	19
C. Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Analisis Capaian Kinerja	24
B. Akuntabilitas Keuangan	42
BAB IV PENUTUP	
A. Penutup	45
LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja	
- Realisasi Anggaran Ittama BNN T.A 2024	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Inspektorat Utama BNN 2020-2024	18
Tabel II.2	Rencana Kerja Inspektur Utama BNN Tahun 2024	19
Tabel II.3	Perjanjian Kinerja Inspektur Utama BNN Tahun 2023	21
Tabel III.1	Capaian Indikator Kinerja Program I	24
Tabel III.2	Kegiatan Pencapaian Indikator Program I	26
Tabel III.3	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program I 2021-2024	26
Tabel III.4	Capaian Indikator Kinerja Program II	28
Tabel III.5	Daftar Satuan Kerja yang Diusulkan untuk Ditetapkan Menjadi WBK/WBBM Tahun 2024	30
Tabel III.6	Persentase Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
Tabel III.7	Capaian Indikator Program Kerja III	34
Tabel III.8	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Utama BNN Tahun 2024 Level 3	35
Tabel III.9	Framework Penilaian Kapabiitas APIP	37
Tabel III.10	Perbandingan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi	38
Tabel III.11	Rincian Anggaran dan Realisasi T.A 2024	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2024	20
Gambar III.1	Penyerahan Laporan Piagam WTP	24

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1	Perbandingan Usulan Satker Tiga Tahun Terakhir	29
Grafik IV.1	Capaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi BNN	37



KALEIDOSKOP INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2024

JANUARI



RAPAT MONEV RB
TRIWULANAN



RAPAT RB
TEMATIK



PENYUSUNAN LKIP ITTAMA



RAPAT PEMBAHASAN
TINDAK LANJUT TIPIKOR BNNP DKI



RAPAT PROGRAM
PRIORITAS E-MINDIK



@ittamabnn_ri



KALEIDOSKOP INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2024

FEBRUARI



ARAHAN IRTAMA PERIHAL
GAKPLIN DI JAJARAN
BNNP DAN BNNK



RAPAT PENYUSUNAN
PEDOMAN AUDIT TIK



RAKORWASDAL



REVIU LKIP BNN



PEMERIKSAAN
LKKL T.A. 2023



@ittamabnn_ri



KALEIDOSKOP INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2024

MARET



MUSREN BNN



WORKSHOP
PENGELOLAAN BMN



SOSIALISASI UKI



RAPAT PENYUSUNAN PEDOMAN
PENUGASAN AUDITOR ITTAMA



RAPAT SUN DALAM PENENTUAN
& PENILAIAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN P4GN T.A. 2024



@ittamabnn_ri



KALEIDOSKOP INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2024

APRIL



RAPAT IDENTIFIKASI
DAN REKRUTMEN
SDM ITTAMA



WASPAM APEL PAGI
DAN HALAL BIHALAL



LKIP ITTAMA



RAKOR EVALUASI
PENGUNAAN SENPI



RAPAT PENGGUNAAN
PDN & UMK-KOP 2023



@ittamabnn_ri



KALEIDOSKOP INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2024

MEI



APLIKASI PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS
SPIP TERINTEGRASI 2024



APLIKASI SISTEM
INFORMASI
KEPEGAWAIAN (ASIK)



SHARING KNOWLEDGE
DALAM RANGKA
PENYUSUNAN PKPT T.A. 2025



KEGIATAN ASISTENSI SERTA
BIMBINGAN PERENCANAAN
AWAL PENGELOLAAN HIBAH
BNNP DKI JAKARTA



KEGIATAN REVISI KEP. 175



@ittamabnn_ri



KALEIDOSKOP INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2024

JUNI



SHARING KNOWLEDGE
PENGAWASAN
KEARSIPAN



PELATIHAN
PENGELOLAAN
PENGADUAN



RAPAT PEMBAHASAN
KEBIJAKAN PENGAWASAN
T.A. 2024



ARAHAN IRTAMA TERKAIT
PERUBAHAN KEBIJAKAN
PENGAWASAN



SOSIALISASI
IMPLEMENTASI SIMAN V2
@PENDOPO DJKN DKI



@ittamabnn_ri



KALEIDOSKOP INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2024

JULI



STUDI BANDING
KEMENPORA



REKONSILIASI LK
SEMESTER I T.A. 2024
@GRAND SAVERO
HOTEL BOGOR



RAPAT PTL PEMBAHASAN
LAPORAN PEMERIKSAAN
KINERJA ATAS PENGELOLAAN
BARANG SITAAN



MONEV CAPAIAN IKPA TRIWULAN
II DAN PERSIAPAN CAPAIAN IKPA
TRIWULAN III T.A. 2024



RAPAT PEMBAHASAN AOI
SPIP



@ittamabnn_ri



KALEIDOSKOP INSPEKTORAT UTAMA

TAHUN 2024

AGUSTUS



ASISTENSI PEMBANGUNAN
DAN EVALUASI ZI @BNNP
KALTIM DAN BARETA
KALTIM



RAPAT PENYUSUNAN
BAHAN PEMAPARAN
RAPIM



PAPARAN PROGRAM
PENGAWASAN ITTAMA DI
LINGKUNGAN BNN 2024



RAPAT EVALUASI CAPAIAN
PENGUNAAN PDN DAN UMK-
KOP DAN STRATEGI PERCEPATAN
PENINGKATAN PENGGUNAAN



RAPAT EVALUASI PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KELOMPOK RENTAN



@ittamabnn_ri



KALEIDOSKOP INSPEKTORAT UTAMA

TAHUN 2024

SEPTEMBER



MONEV SOP 2024 ITTAMA



RAPAT KEBIJAKAN
PENGAWASAN
INTERNAL ITTAMA



ZOOM MEETING PERSIAPAN
DESK EVALUASI TPN



RAPAT TAMBAHAN ANGGARAN



RAPAT PEMBAHASAN MUATAN SASARAN
INDIKATOR DAN TARGET RANCANGAN
RENSTRA BNN 2025-2029



@ittamabnn_ri



KALEIDOSKOP INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2024

OKTOBER

EKSPONAT HASIL
PENILAIAN MANDIRI DAN
PENJAMINAN KUALITAS
MATURITAS SPIP DAN
PENILAIAN MANDIRI
KAPABILITAS APIP BNN
TAHUN 2024



KEGIATAN PERSIAPAN DESK
EVALUASI ZONA
INTEGRITAS



KEGIATAN PENYUSUNAN PKPT
2025



PENDAMPINGAN EVALUASI
LAPANGAN SATKER ZI MENUJU
WBK OLEH MENPAN RB



BIMTEK ARSIP DIGITAL BNN
ANGKATAN II TAHUN 2024



@ittamabnn_ri



KALEIDOSKOP INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2024

NOVEMBER



ENTRY MEETING EVALUASI
ATAS PENILAIAN MANDIRI
KAPABILITAS APIPDAN
AMTURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP
TERINTEGRASI T.A. 2024



BIMTEK PENGGUNAAN
APLIKASI PERSURATAN
SRIKANDI DI LINGKUNGAN
ITTAMA



PENYERAHAN LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN KEUANGAN
SEMESTER I TAHUN 2024



PILOTING IMPLANTASI CETAK
BIRU PEMBINAAN KAPABILITAS
PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH PADA BNN



RAPAT TERKAIT PEMAKSIMALAN
PENYERAPAN ANGGARAN DAN
EVALUASI MASING-MASING POKJA
SECARA INTERNAL ITTAMA



@ittamabnn_ri



KALEIDOSKOP INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2024

DESEMBER



kegiatan pengawasan
pemusnahan Obat yang
sudah kadaluarsa



Kompilasi Audit Wilayah
BNN TA 2024



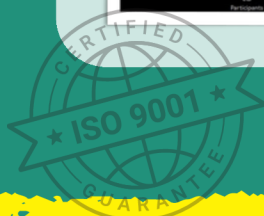
RAPIM BULAN DESEMBER



EKPOSE KAPABILITAS APIP
TA. 2024



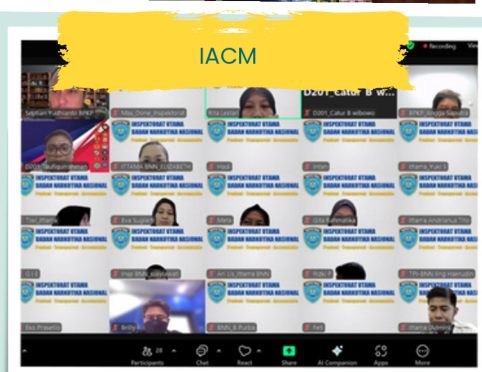
Rapat Penyusunan Rencana Aksi
LHP BPK RI atas PDTT (belanja
pegawai, belanja modal dan
belanja barang) T.A 2024



@ittamabnn_ri



CAPAIAN INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2024



@ittamabnn_ri



INSPEKTORAT UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



IKHTISAR EKSEKUTIF

CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT UTAMA BNN TAHUN 2024

Opini BPK atas Laporan Keuangan

WTP

Jumlah Satuan Kerja
yang Memperoleh
WBK/WBBM

Target
1 BNNP/BNNK

Realisasi

3 → 300 %

BNNP/BNNK

Nilai Internal Audit
Capability Model (IACM)

Target
Level 3

Realisasi

Level 3

Capaian ini diperoleh melalui hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim BPKP.

Hasil Penilaian IACM

No	Elemen/Topik	Penilaian Mandiri		Evaluasi	
		Level	Skor	Level	Skor
I	Dukungan Pengawasan/Enabler (60%)		2,31		2,205
1	Pengelolaan SDM (30%)	4	0,72	4	0,72
2	Praktik Profesional (30%)	3	0,63	3	0,54
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (10%)	4	0,24	3	0,225
4	Budaya dan Hubungan Organisasi (10%)	4	0,24	4	0,24
5	Struktur Tata Kelola (20%)	4	0,48	4	0,48
II	Aktivitas Pengawasan dan Kualitas Pengawasan/Delivery and Result (40%)		1,5		1,2
6	Peran dan Layanan	4		3	
7	Simpulan Entitas	3	3,81	3	3,405

Nilai IACM sejak Tahun 2020 melalui pemenuhan dokumen, pelaksanaan kegiatan yang mendukung IACM level 3, dan penilaian mandiri (self assessment). Hal ini dikarenakan pada Tahun 2022 tidak dilakukan penilaian /evaluasi oleh BPKP

Anggaran dan Realisasi T.A. 2024

PAGU 2024

Rp8,925,788,000



peringkat **IKPA** dengan nilai
96.98

Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi

No	Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,291
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,031
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,080

Penguatan pengendalian Internal tersebut dalam Penetapan Tujuan dan Pencapaian Tujuan yang dibuktikan juga dengan terus naiknya nilai SAKIP tiga tahun terakhir yakni, 2019 (64) predikat "B", 2020 (65,32) predikat "B" 2021 (66,5) predikat "B". 2022 (68,53) predikat "B" dan 2023 (68,91) predikat "B".

Penyerahan Laporan Piagam WTP



Selanjutnya Ittama BNN 2025:

1. Meningkatkan peran auditor sebagai Catalyst of Change and Trusted Advisor dalam pelaksanaan pengawasan internal.
2. Adanya komunikasi yang intensif dengan unit kerja terkait tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Terbangunnya komitmen pimpinan unit kerja dalam tindak lanjut hasil pengawasan MR dan SPIP unit kerja.
4. Penyelenggaraan SPIP di setiap unit kerja dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi.
5. Koordinasi yang baik dan keterlibatan yang aktif dari seluruh pegawai Inspektorat sehingga memupuk tingginya budaya peduli risiko di Inspektorat.
6. Evaluasi SAKIP untuk mendorong peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan BNN.
7. Melakukan asistensi serta monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas di lingkungan BNN menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
8. Meningkatkan mutu audit dengan audit berbasis risiko.
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai secara berkala sesuai dengan tugas dan fungsi Ittama BNN.



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

B. DASAR HUKUM

**C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
ORGANISASI SERTA STRUKTUR
ORGANISASI**

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN



BAB I

PENDAHULUAN

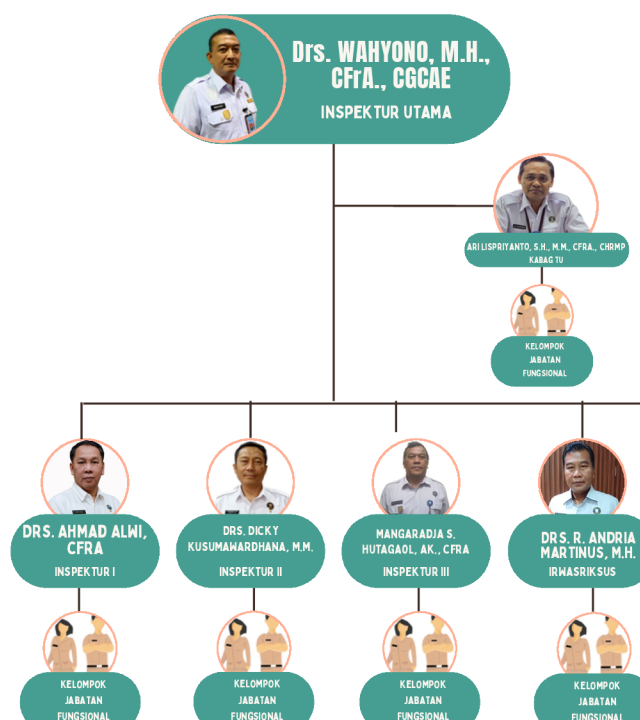
• A. Gambaran Umum •

Inspektorat Utama BNN merupakan unit Eselon I pada Badan Narkotika Nasional, sesuai dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

Inspektorat Utama BNN mempunyai Program Dukungan Manajemen dengan empat sasaran program, yaitu :

1. Terwujudnya tata kelola BNN yang berkualitas;
2. Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran P4GN;
3. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi BNN;
4. Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di BNN.

Inspektorat Utama BNN terdiri dari 4 (empat) unit Eselon II dan Bagian Tata Usaha yaitu Inspektorat I, II, III, dan Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus. Struktur organisasi Inspektorat Utama BNN disajikan dalam gambar di bawah ini:



WILAYAH KERJA INSPEKTORAT UTAMA

Inspektorat I

WILAYAH KERJA INSPEKTORAT I : DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN, DEPUTI BIDANG REHABILITASI, BALAI BESAR REHABILITASI, BNNP KALIMANTAN TENGAH, BNN KOTA PALANGKARAYA, BNN KOTA DUMAI, BNN KOTA PEKANBARU, BNNK LHOKESEUMAWA, BNNK ACEH TAMIANG, BNN KOTA DEPOK, BNNK GARUT, BNN KOTA SURAKARTA, BNNP JAWA TENGAH, BNNK CIAMIS, BNN KOTA TASIKMALAYA, BNNP RIAU, BNNK PELALAWAN, BNNK KUANTAN SINGINGI, BNNK SIMALUNGUN, BNNK OKU TIMUR, BNNP KEPULAUAN RIAU, BNN KOTA BATAM, BNNP KALIMANTAN TIMUR, BNN KOTA SAMARINDA, BNN KOTA TANJUNG PINANG, BNNK KARIMUN, BNNK PIDIE JAYA, BNN KOTA SABANG, BNNP JAWA BARAT, BNN KOTA BANDUNG, BNNK KUNINGAN, BNN KOTA CIREBON, BNNK TAPANULI SELATAN, BNNK MANDAILING NATAL, BNNK MUSI RAWAS, BNNK MUARA ENIM

Inspektorat III

Wilayah Kerja Inspektorat III : DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN, PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI, DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJASAMA, PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA, BNN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA, BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN, BNN PROVINSI SUMATERA UTARA, BNN KABUPATEN BIREUEN, BNN KABUPATEN PIDIE, BNN KOTA PEMATANG SIANTAR, BNN KABUPATEN LANGKAT, BNN KABUPATEN DELI SERDANG, BNN KOTA TARAKAN, BNN KABUPATEN NUNUKAN, BNN KOTA PRABUMULIH, BNN KABUPATEN OGAN ILIR, BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, BNN PROVINSI SULAWESI UTARA, BNN PROVINSI DKI JAKARTA, BNN PROVINSI JAWA TIMUR



Inspektorat II

WILAYAH KERJA INSPEKTORAT II : SEKRETARIS UTAMA BNN, INSPEKTORAT UTAMA BNN, PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PPSDM), BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT, BNN KOTA PONTIANAK, BNN KABUPATEN BENGKAYANG, BNN KABUPATEN SINTANG, BNN KABUPATEN SANGGAU, BNN KABUPATEN KUBU RAYA, BNN KOTA SINGKAWANG, BNN KABUPATEN MEMPAAH, BNN KABUPATEN GAYO LUES, BNN KABUPATEN ACEH SELATAN, BNN KOTA LANGSA, BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, BNN KOTA GUNUNGSITOLI, BNN KOTA TANJUNG BALAI, BNN KABUPATEN ASAHAN, BNN KABUPATEN BATU BARA, BNN KOTA PAGARALAM, BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG, BNN KOTA LUBUKLINGGAU, BNN PROVINSI SUMATERA BARAT, BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, BNN PROVINSI BANTEN, BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH, BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA, BNN PROVINSI MALUKU, BNN PROVINSI PAPUA, BNN PROVINSI PAPUA BARAT

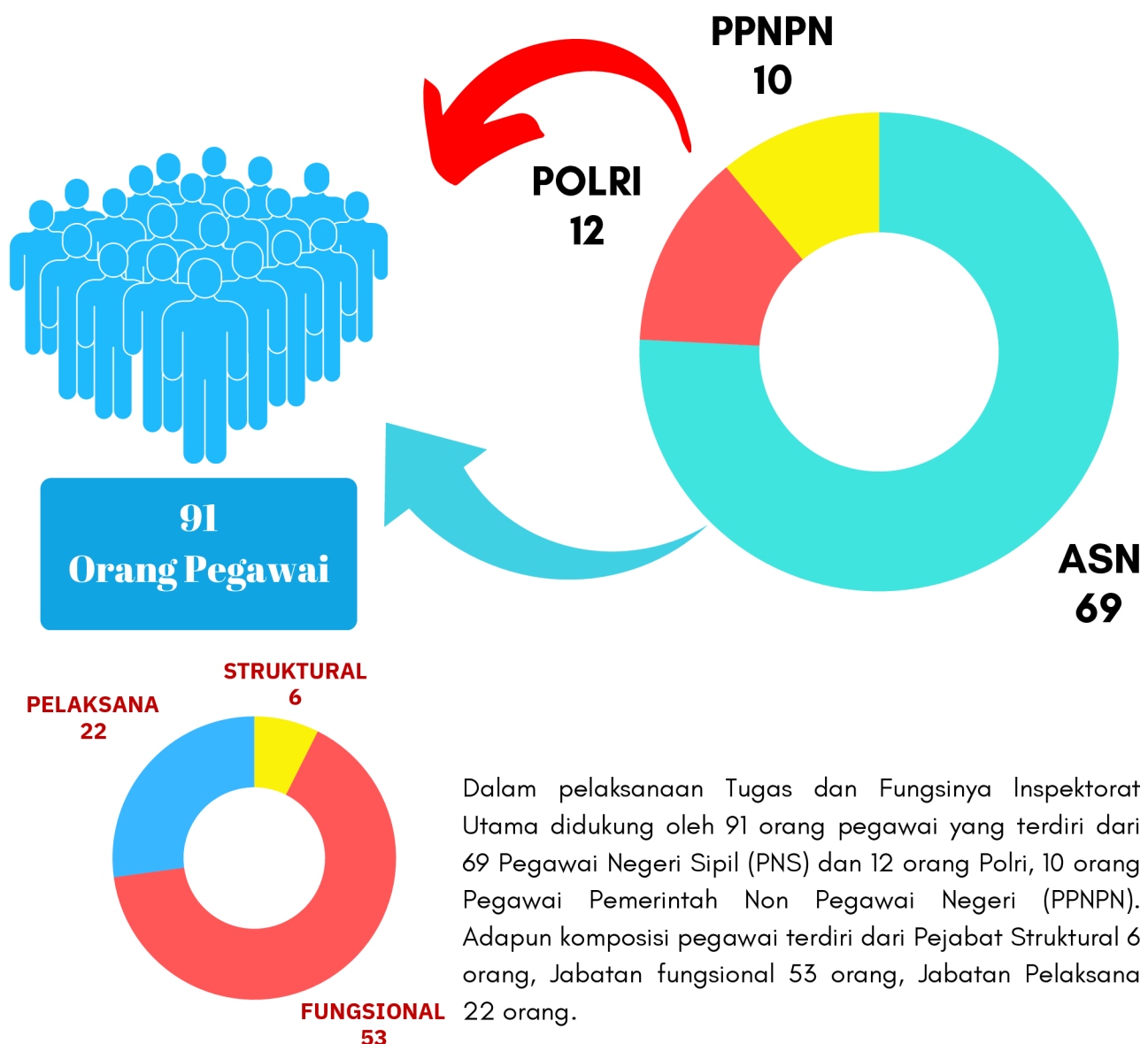
Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus

Wilayah Kerja Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus dengan penugasan dari Kepala BNN atau tugas khusus lain.

Berdasarkan tugas Inspektorat I, Inspektorat II, dan Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan satuan kerja dan wilayah tertentu. Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN, dan penugasan khusus lain.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, serta fasilitasi administrasi penyusunan laporan hasil pengawasan, urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama BNN disajikan dalam gambar di bawah ini

Inspektorat Utama BNN memiliki sumber daya manusia sebanyak 91 orang. Data SDM Inspektorat Utama BNN tersaji dalam tabel berikut.



• B. DASAR HUKUM •

Laporan Kinerja Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 Satuan Kerja Inspektorat Utama Nomor: SP DIPA066.01.1.681600/2024 tanggal 24 November 2023;
12. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/1125/XII/KA/PR.01/2023/BNN tanggal 19 Oktober 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024;

13. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/752/VI/KA/PR.01.01/2024/BNN tanggal 25 Juni 2024 tentang Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024;

● C. Tugas Pokok , dan Fungsi Organisasi Serta Struktur Organisasi ●

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional bahwa Inspektorat Utama BNN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BNN.

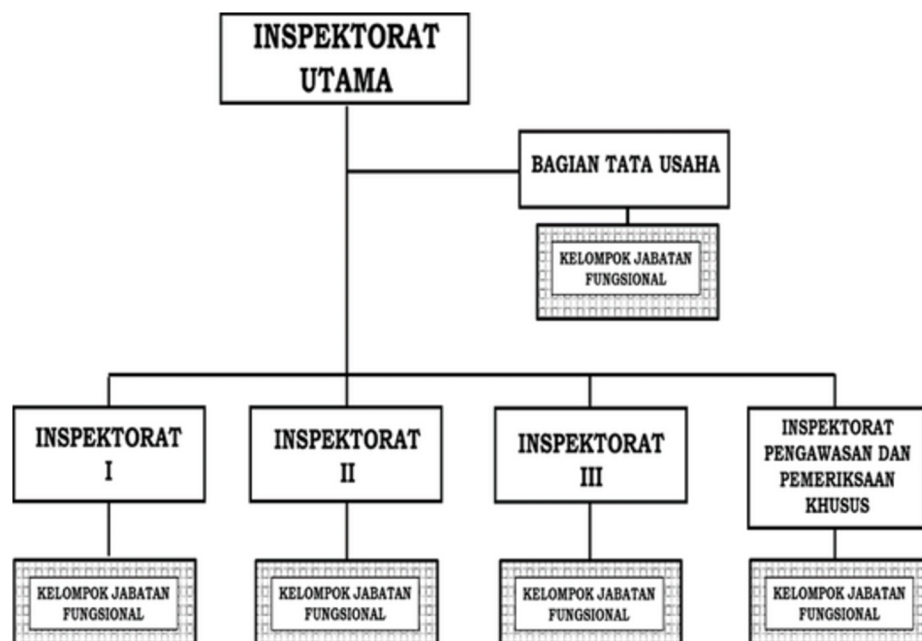
2. Fungsi Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat Utama BNN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNN;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- d. Pelaksanaan penegakan disiplin, Kode Etik Pegawai BNN, dan Kode Etik Profesi Penyidik BNN;
- e. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN; dan
- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Ittama BNN dipimpin oleh Inspektur Utama yang membawahi Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus, serta Bagian Tata Usaha, dengan bagan Struktur Organisasi sebagai berikut:



● D. Sistematika Penyajian ●

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Ittama BNN Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Dasar Hukum
- C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Serta Struktur Organisasi
 1. Tugas
 2. Fungsi Organisasi
 3. Struktur Organisasi Inspektorat Utama

D Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kerja
- C. Perjanjian Kinerja

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Analisis Capaian Sasaran
- B. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

- Dokumen Pengukuran Kinerja



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2024

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

● A. Rencana Strategis ●

Rencana strategis ini menjadi acuan bagi Inspektorat Utama BNN dalam merumuskan rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja dengan bawahan. Rencana strategis ini juga menjadi dasar dalam menentukan sasaran dan tujuan organisasi yang ingin dicapai.

Rencana Strategis (Renstra) BNN telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024. Dalam Renstra 2020-2024 disebutkan visi BNN adalah sebagai berikut:





Tabel II.1 Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Tahun 2020-2024

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target					Unit Kerja Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat Utama
		Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM	3	6	9	12	15	
		Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3	3	3	4	

Tabel II.1 dalam Laporan Kinerja Inspektorat Utama BNN Tahun 2024 memuat Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program yang menjadi fokus utama dalam pencapaian kinerja organisasi. Program-program ini merupakan bagian integral dari upaya Inspektorat Utama BNN dalam meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif.

Melalui Tabel II.1, para pemangku kepentingan dapat memahami dengan jelas program-program yang dikerjakan oleh Inspektorat Utama BNN dan bagaimana keberhasilan dalam pelaksanaannya diukur. Hal ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fokus dan arah kerja Inspektorat Utama BNN dalam mencapai tujuan organisasi.

• B. Rencana Kerja •

Rencana Kerja adalah bagian penting dari perencanaan kinerja organisasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BNN. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari rencana strategis dalam target tahunan dan media penghubung antara rencana strategis dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran.

Dalam Rencana Kerja, Inspektorat Utama BNN merumuskan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana Kerja ini juga mencakup indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk tahun 2024 Inspektorat Utama BNN memiliki rencana kerja sebagai berikut:

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Organisasi yang Ekonomis, Efisien, dan Efektif.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	9.167.416.000
		Jumlah Satuan Kerja Yang Memperoleh WBK/WBBM	1	
		Nilai <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM)	3	

Tabel II.2 Rencana Kerja Inspektur Utama BNN Tahun 2024

• C. Perjanjian Kinerja •

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan/komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periodisasi satu tahun anggaran. Melalui perjanjian kinerja, komitmen dan kesepakatan antara atasan dengan bawahan menjadi bukti nyata kesungguhan atas integritas dan kompetensi terhadap pencapaian tujuan organisasi yang menghasilkan tidak hanya output namun juga hasil outcome yang dapat memberikan dampak positif bagi organisasi itu sendiri.

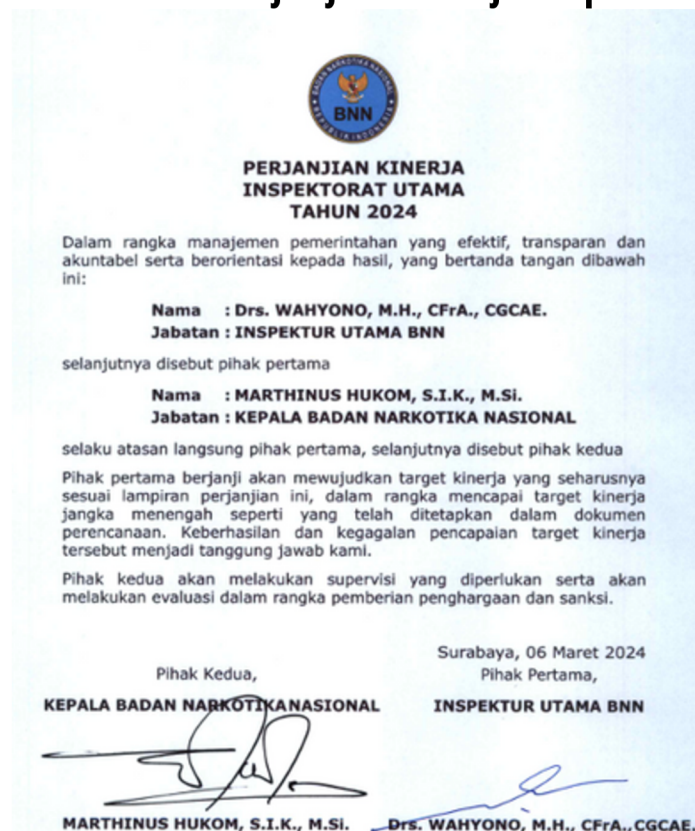
Melalui perjanjian kinerja, setiap pihak yang terlibat dapat memahami dengan jelas tanggung jawab dan harapan yang harus dipenuhi dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja juga menjadi alat penting dalam mengevaluasi capaian kinerja individu atau unit kerja, serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang harus diambil untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan adanya perjanjian kinerja yang jelas dan terukur, Inspektorat Utama BNN dapat memastikan bahwa setiap individu atau unit kerja memiliki arah yang jelas dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Perjanjian kinerja juga menjadi bukti nyata komitmen dan kesungguhan dalam mencapai kinerja yang optimal demi tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan.

Dengan demikian, perjanjian kinerja menjadi instrumen yang sangat penting dalam memastikan pencapaian kinerja yang optimal dalam organisasi, serta menjadi landasan bagi penilaian kinerja dan pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang.

Adapun perjanjian kinerja Inspektorat Utama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar II.1 Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2024



The image shows a formal document titled "PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2024". At the top center is the BNN (Badan Narkotika Nasional) logo. The text is in Indonesian. It states the purpose of the agreement is for effective, transparent, and accountable management. It identifies two parties: the first party is **Drs. WAHYONO, M.H., CFrA., CGCAE.**, **INSPEKTUR UTAMA BNN**; the second party is **MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.**, **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**. The document outlines that the first party will set performance targets and the second party will supervise and evaluate. It is dated **Surabaya, 06 Maret 2024**. At the bottom, there are two signature lines. The first line is for the **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL** (MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.) and the second line is for the **INSPEKTUR UTAMA BNN** (Drs. WAHYONO, M.H., CFrA., CGCAE.).

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT UTAMA
TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. WAHYONO, M.H., CFrA., CGCAE.
Jabatan : INSPEKTUR UTAMA BNN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.
Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Pihak Pertama,
INSPEKTUR UTAMA BNN

MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si. **Drs. WAHYONO, M.H., CFrA., CGCAE.**

NO.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Organisasi yang Ekonomis, Efisien, dan Efektif.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
			Jumlah Satuan Kerja Yang Memperoleh WBK/WBBM	1
			Nilai <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM)	3

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Inspektur Utama BNN Tahun 2024

Sasaran program Inspektorat Utama diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan BNN yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria, yakni:

- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- Kecukupan Pengungkapan
- Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – Undangan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Pengukuran yang dilakukan merupakan hasil pemeriksaan BPK RI penilaian atas Laporan Keuangan BNN Tahun 2023. Inspektorat Utama BNN memiliki target Opini BPK atas Laporan Keuangan BNN yaitu Wajar Tanpa Pengecualian / WTP (unqualified opinion) adalah opini audit yang akan diberikan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

2. Jumlah Satuan Kerja yang Memperoleh WBK/WBBM

Satuan Kerja yang Memperoleh WBK/WBBM adalah Satker yang mampu mendapatkan WBK/WBBM berdasarkan penilaian dari KemenPAN-RB untuk memperoleh predikat WBK/WBBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Instansi Pemerintah. Inspektorat Utama BNN memiliki target sebanyak 1 Satker yang diusulkan ke TPN untuk memperoleh penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Syarat	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai Komponen Hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	18,25	19,50
- Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)
- Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	2,50	3,75
Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal	14,00 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)

Syarat satuan kerja yang dapat ditetapkan sebagai WBK adalah:

- Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBK;
- Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor intergrasi proses bisnis minimal 6,5 untuk predikat WBK.

Syarat satuan kerja yang dapat ditetapkan sebagai WBBM adalah:

- Kawasan tersebut telah mendapat predikat Kawasan Menuju WBK;
- Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBBM;
- Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor intergrasi proses bisnis minimal 7,5 untuk predikat Menuju WBBM.

Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 90 tahun 2021, Indeks Capaian Reformasi Birokrasi = 60% Komponen Pengungkit [meliputi 8% Manajemen Perubahan + 7% Penataan Tatalaksana+ 10% Penataan Sistem Manajemen SDM + 10% Penguatan Akuntabilitas Kinerja + 15% Penguatan Pengawasan + 10% Penguatan Kualitas Pelayanan Publik] + 40% Komponen Hasil [meliputi 22,50% Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel + 17.50% Kualitas Pelayanan Publik yang prima].

3. Nilai IACM

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas serta dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Sedangkan nilai IACM adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP BNN berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level Kapabilitas APIP oleh BPKP. Hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri diharapkan dapat menggambarkan area-area yang memerlukan perbaikan (*Area of Improvement/Aol*). Aol tersebut menjadi dasar perumusan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan menuju Kapabilitas APIP BNN yang lebih baik. Rencana aksi tersebut akan dimonitor lebih lanjut oleh BPKP dan APIP BNN dalam rangka meningkatkan Kapabilitas APIP sampai dengan level optimum.

Inspektorat Utama BNN memiliki target IACM pada Tahun 2024 memperoleh level 3 (*Delivered*) yang menunjukkan bahwa telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP BNN sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, serta perbaikan tata kelola bagi BNN.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan tidak tercapainya pelaksanaan kegiatan, misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

A.1 Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian sasaran program melalui capaian indikator kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024	Pencapaian Target	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan Organisasi yang Ekonomis, Efisien, dan Efektif.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	WTP

Tabel III.1 Capaian Indikator Kinerja Program I

Gambar III.1. Penyerahan Laporan Piagam WTP



Pada tahun 2024 BNN memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BNN Tahun 2023. Opini tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022 dengan Nomor: 16.a/LHP/XIV/05/2024 Tanggal 21 Mei 2024. Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, S.IK., M.Si didampingi Sekretaris Utama BNN RI, Drs. Tantan Sulistyana, S.H., S.I.K, dan Inspektur Utama BNN RI Drs. Wahyono, M.H., CFA., CGCAE menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tahun 2023 bertempat di Ruang Auditorium BPK RI pada hari Kamis, 25 Juli 2024. Penghargaan ini menggambarkan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan telah berjalan dengan baik dan capaian kinerja Ittama BNN telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja WTP di tahun 2024 ini merupakan pencapaian 15 (lima belas) kali berturut-turut sejak tahun 2009 s.d 2023.

Keberhasilan pencapaian target kinerja berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh BNN tidak lepas dari kontribusi kegiatan pada Inspektorat I, II, III dan Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus serta Bagian Tata Usaha, dengan sasaran kinerja meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja dengan indikator persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dan persentase satuan kerja yang menindaklanjuti hasil audit dengan tujuan tertentu, melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Pelaksanaan Audit Kinerja;
- b. Pelaksanaan Audit PNBP;
- c. Reviu Laporan Keuangan BNN;
- d. Pendampingan persiapan audit BPK pada semua satker;
- e. Pemantauan secara intensif terhadap satker dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target IKP “Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan I/II/III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit” yaitu:

- a. Koordinasi yang baik antara Inspektorat Utama selaku tim reviu dengan Biro Keuangan dan BMN selaku koordinator utama dalam proses penyusunan Laporan Keuangan BNN;
- b. Peningkatan kapasitas tim reviu melalui pelatihan dari luar maupun pelatihan kantor sendiri.

Tabel III.2 Kegiatan Pencapaian Indikator Program I

NO	KEGIATAN	Volume	KETERANGAN
a.	Pelaksanaan Audit Kinerja	12 Satker	BNNK Bandung Barat, BNNK Menpawah, BNNK Kediri, BNNK Batang Hari, BNNK Prabumulih, BNNP Kepri, BNNK Serdang Bedagai, BNN Kota Bandung, BNNK Jaktim, BNNK Jaksel, BNNK Gresik, BNNK Bogor
b.	Pelaksanaan audit PNPB	12 Satker	BNNP Lampung, BNNP Maluku, BNNP Sulut, BNN Kota Batu, BNNK Badung, BNNP Sumbar, BNNP Kaltim, BNNK Batanghari, BNNK Sukabumi, BNN Kab. Malang, BNNK Mojokerto, BNNK Tanjung Balai
c	Reviu Laporan Keuangan BNN	2 kali	Dilaksanakan pada 2 periode, semester 1 dan 2
d	Telaah Proposal	34 OP	Sesuai disposisi dari Irta
e	Pendampingan persiapan audit BPK pada semua satker	15 Satker	Satker Pusat (12 Satker) Eselon II BNN Wilayah (3 Satker), Banten, Jabar, Balai Rehab Baddoka

Berdasarkan tren 2020-2024, capaian target Wajar Tanpa Pengecualian berhasil dipertahankan selama 4 tahun terakhir. Perbandingan Realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan tahun 2021 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:

Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Capaian IKP 1 2021-2024

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendapatkan opini WTP, antara lain:

- a. Membuat program kerja pendampingan dan membentuk tim pendampingan dari auditor kepada satuan kerja sebagai wujud antisipasi dan meminimalisir terjadinya temuan baru;

Memantau satuan kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan terus melaksanakan koordinasi yang intensif dengan satuan kerja untuk memberikan pemahaman terkait dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Ketercapaian IKP kesatu “Opini BPK Atas Laporan Keuangan” didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan I/II/III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit. IKK ini adalah indikator pada eselon II Inspektorat Utama yaitu “presentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit” dengan target 70% telah terealisasi 93,85%. Untuk mencapai target IKK ini didukung oleh komponen Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang di dalamnya terdapat target laporan sebanyak 6 laporan dan telah terealisasi seluruhnya (100%). Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator tersebut diantaranya:

1. Penyusunan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
2. Pemantauan tindak lanjut temuan hasil pengawasan;
3. Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Analisis dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal;
6. Koordinasi eksternal.

Selain faktor keberhasilan, terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKP kesatu diantaranya:

- a. Pada saat melakukan reviu LK, CaLK masih dalam proses penyusunan;
- b. Waktu untuk mereviu sangat singkat serta minimnya anggaran reviu.

Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut dilakukan antisipasi dengan beberapa langkah:

- a. Melakukan koordinasi dengan satker terkait;
- b. Reviu dilakukan secara daring dan luring;

Sedangkan upaya yang akan dilakukan di tahun 2024 untuk mempertahankan capaian indikator kinerja ini, diantaranya :

- a. Melakukan koordinasi secara intensif dengan satuan kerja untuk meningkatkan kepatuhan tata kelola, kinerja dan keuangan
- b. Mendorong peningkatan pengendalian intern pada setiap satker
- c. Mengoptimalkan kegiatan konsulting baik melalui online maupun tatap muka

2. Jumlah Satuan Kerja yang memperoleh Predikat WBK/WBBM

Sesuai dengan definisi operasional yang terdapat dalam Renstra revisi Inspektorat Utama BNN 2020-2024, IKP "Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM " menjadi indikator pendukung capaian indeks reformasi birokrasi BNN.

Tabel III.4 Capaian Indikator Program II

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024	Pencapaian Target (%)	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien dan efektif	Jumlah satuan kerja yang memperoleh WBK/WBBM	1	3	300%	17	20	25

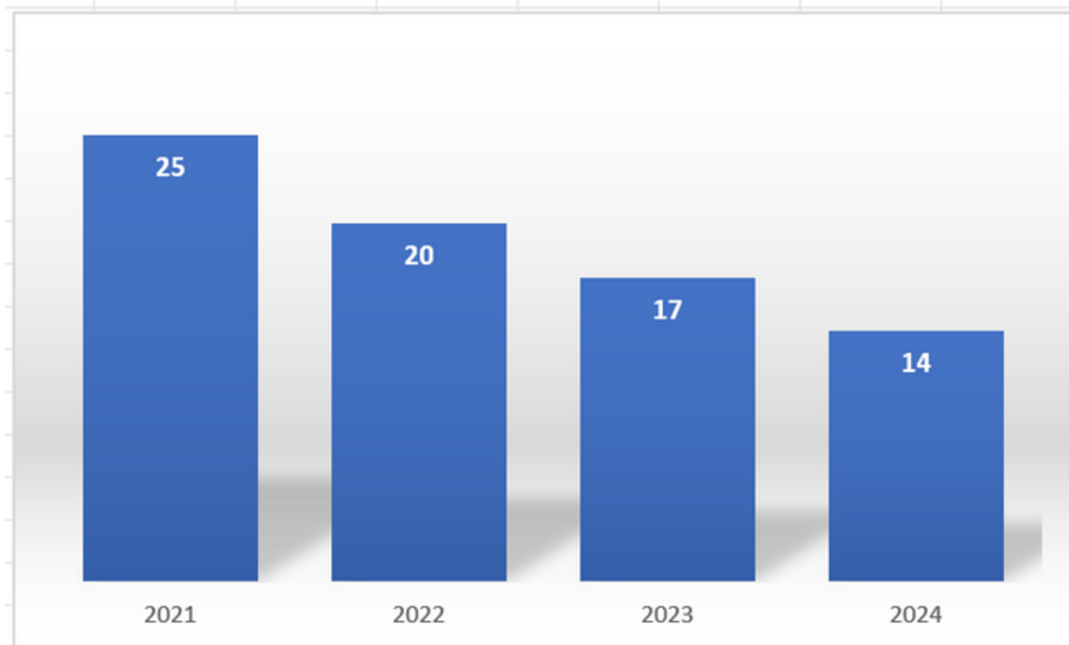
Realisasi tahun 2024 ini tercapai melebihi target yang telah ditetapkan, dari target 1 Satker tercapai 3 Satker atau sebesar 300%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang tercapai sebesar 2 Satker, capaian tahun 2024 mengalami kenaikan satker yang memperoleh WBK/WBBM.

Namun, secara umum bahwa setiap tahun capaian kinerja atas indikator ini melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya tidak dapat diperbandingkan dikarenakan adanya perubahan indikator kinerja dari Jumlah Satker.

Selain hal tersebut untuk mendorong persentase tingkat keberhasilan unit kerja yang memperoleh WBK/WBBM maka Inspektorat Utama melalui Tim Penilai Internal (TPI) melakukan seleksi yang lebih ketat sesuai dengan PermenPAN Rb Nomor 90 Tahun 2021 dalam pengajuan Satuan Kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM kepada KemenPANRB.

Berikut disajikan grafik perbandingan usulan satker dalam 4 (empat) tahun terakhir

Grafik III.1 Perbandingan Usulan Satker Tiga Tahun Terakhir



Capaian melebihi target dicapai dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh TPI sebagai berikut :

- a. Perencanaan kegiatan yang disusun komprehensif dan dilaksanakan sesuai target;
- b. Koordinasi yang lebih intensif dengan tim penilai nasional KemenPAN-RB;
- c. Adanya pelibatan Satker yang telah memperoleh predikat WBK dan WBBM di tahun sebelumnya;
- d. Melakukan simulasi evaluasi.

Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) tersebut di atas, adapun 14 satuan kerja yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi WBK/WBBM sesuai dengan Surat Kepala BNN Nomor: B/2164/VII/KA/IR.04.05/2024/BNN tanggal 25 Juli 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.5 Daftar Satuan Kerja Yang Diusulkan Untuk Ditetapkan Menjadi WBK/WBBM Tahun 2024

Indikator	Satuan Kerja	Nilai
WBK	1 BNN Provinsi Sumatera Selatan	87,50
	2 BNN Provinsi Lampung	84,94
	3 BNN Provinsi Banten	83,09
	4 BNN Kabupaten Kendal	84,77
	5 BNN Kabupaten Purbalingga	84,72
	6 BNN Kabupaten Cilacap	85,53
	7 BNN Kabupaten Batang	85,16
	8 BNN Kabupaten Garut	84,02
	9 BNN Kota Tangerang	83,59
	10 BNN Kota Kendari	82,51
	11 BNN Kota Banjarbaru	82,62
	12 BNN Kota Denpasar	86,63
	13 BNN Kota Pematang Siantar	81,60
	14 Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	85,57

Analisis dan evaluasi realisasi kinerja ini menunjukkan bahwa Inspektorat Utama BNN berhasil melampaui target yang ditetapkan secara signifikan. Hal ini mencerminkan upaya yang kuat dalam mendukung dan memfasilitasi satuan kerja untuk mencapai standar pelayanan publik yang tinggi (WBK/WBBM). Pencapaian yang melebihi target ini menunjukkan komitmen Inspektorat Utama BNN dalam memastikan bahwa satuan kerja di lingkungan BNN memenuhi standar pelayanan publik yang tinggi dan berkinerja optimal.

Dari 14 satker yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi WBK/WBBM, BNN berhasil mendapatkan predikat satker WBK, adapun satker tersebut adalah Balai Rehabilitasi Tanah Merah, BNNK Purbalingga, dan BNN Kota Denpasar.

Keberhasilan pencapaian target IKP ini disebabkan adanya faktor pendukung yaitu:

- a. Kontinuitas dalam memberikan pendampingan kepada unit kerja yang diusulkan.
- b. Memberikan Pelatihan Kantor Sendiri/Sosialisasi terkait Evaluasi dan Pemantauan ZI WBK/WBBM kepada auditor.
- c. TPI selalu melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam pendampingan maupun penilaian Satker menuju WBK WBBM sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi eksternal.
- d. Adanya komitmen Tim Evaluator Sakip dalam menjaga akuntabilitas Satker BNN dengan memperluas jangkauan evaluasi dan peningkatan kualitas dan kuantitas Tim Evaluator Sakip

IKP ini tercapai sesuai target yang direncanakan, namun terdapat beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja, yaitu:

- a. Pelaksanaan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh TPI bergantung pada proses pengajuan satker yang mendekati jadwal pada jadwal yang ditetapkan KemenPAN-RB;
- b. Adanya pembatasan jumlah satker yang dapat diusulkan ke TPN berdasarkan Surat Edaran Kepala BNN Nomor: SE/23/II/KA/IR.04.05/2024/BNN tanggal 27 Februari 2024 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.;
- c. Terdapat beberapa catatan Desk Evaluasi dari KemenPAN-RB yang perlu ditindaklanjuti oleh satker;
- d. Masih terdapat perbedaan persepsi terkait pemenuhan data dukung oleh satker.

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan target IKP ini yaitu:

- a. Menyiapkan data satker yang akan dievaluasi dan melakukan koordinasi dengan Unit Utama yang akan mengusulkan satker ZI WBK dan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan disesuaikan jadwal yang telah ditentukan oleh KemenPAN-RB;
- b. Memberikan penghargaan internal oleh Kementerian terhadap satker yang tidak dapat diusulkan ke KemenPAN-RB namun lolos penilaian TPI sesuai Surat Edaran MenPAN RB Nomor 15 Tahun 2022 Hal: Pengusulan Unit Kerja dalam Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah WBK dan WBBM dan surat KemenPAN-RB Nomor B/14/PW.00/2022 tanggal 24 Mei 2022, Hal: Ketentuan Tambahan Pengusulan Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2022)
- c. Melakukan pertemuan via aplikasi ZOOM maupun tatap muka yang difasilitasi oleh Inspektorat Utama. Rapat tersebut dilaksanakan untuk mensosialisasikan catatan Desk Evaluasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Satker. Penilaian dilakukan melalui aplikasi ZOOM dan dipantau pelaksanaannya oleh tim dari Unit Kerja, dan Tim Inspektorat Utama;
- d. Tim Penilai Internal memberikan penjelasan secara detail untuk data dukung yang harus dilengkapi
- e. Adanya penyesuaian anggaran dalam pembangunan ZI menuju WBK WBBM, sehingga pendampingan tidak dapat dilakukan secara optimal melalui tatap muka.
- f. Selain melakukan pendampingan oleh TPI secara daring, metode penilaian dan pendampingan Satker menuju WBK WBBM juga dilakukan secara melekat dan berjenjang

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target IKP yaitu:

- a. Melakukan pendampingan dan pemantauan untuk melihat perubahan/perbaikan dari satker calon ZI-WBK;
- b. Melakukan evaluasi yang lebih mendalam untuk mendapatkan satker yang layak untuk diusulkan dan memberi masukan terkait data/dokumen yang harus disajikan oleh satker terkait pembangunan ZI WBK/WBBM;
- c. Meningkatkan pemahaman auditor melalui kegiatan PKS dan mengikutsertakan auditor dalam kegiatan pelatihan terkait dengan substansi evaluasi ZI WBK/WBBM.

Keberhasilan termasuk upaya yang kuat dalam mendukung dan memfasilitasi satuan kerja untuk mencapai standar pelayanan publik yang tinggi (WBK/WBBM). Inspektorat Utama BNN telah memberikan pendampingan intensif, sosialisasi, dan simulasi evaluasi kepada satuan kerja, serta melakukan pemantauan yang efektif untuk memastikan pemenuhan kriteria WBK/WBBM. Penurunan jumlah satuan kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM pada 3 (tiga) tahun terakhir disebabkan untuk mendorong tingkat keberhasilan unit kerja yang memperoleh WBK, maka Inspektorat Utama melalui tim penilai intern (TPI) melakukan seleksi yang lebih ketat sesuai dengan permenpan nomor 90 tahun 2021, sehingga yang tadi usulan di tahun 2022 sebanyak 20 satker menjadi 17 satker.

Dengan demikian, keberhasilan dalam mencapai target kinerja Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM menunjukkan komitmen dan kemampuan Inspektorat Utama BNN dalam mendorong perubahan menuju pelayanan publik yang lebih baik dan berkinerja tinggi.

Tabel III.6 Persentase Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4 = (2-3)
Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM	142 Target : 9 Satker Capaian : 20 Satker	99,18 Anggaran: 13.729.805.000 Realisasi: 13.617.904.863	42,82

Dalam hal ini, realisasi anggaran yang tercatat adalah sebesar Rp8,925,788,000- (delapan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atau 99.18% dari anggaran yang dialokasikan. Dengan demikian, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 42,82% . Meskipun efisiensi penggunaan sumber daya yang tercatat tidak signifikan, namun pencapaian target kinerja yang jauh melampaui target yang ditetapkan menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien telah dilakukan oleh Inspektorat Utama BNN. Hal ini mencerminkan manajemen yang efektif dalam memfasilitasi dan mendorong perubahan positif di lingkungan kerja, serta penggunaan sumber daya yang tepat dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber daya yang tercatat menunjukkan bahwa Inspektorat Utama BNN telah berhasil dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM.

3. Nilai *Internal Audit Capability Model* (IACM)

Definisi operasional dari indikator kinerja Nilai Internal Audit Capability Model (IACM) adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP BNN berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level Kapabilitas APIP oleh BPKP.

Adapun metode pengukuran indikator kinerja nilai IACM melalui penilaian secara mandiri (*self assessment*) dengan menggunakan Framework Penilaian Kapabilitas APIP sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga.

Adapun capaian kinerja di tahun 2024 dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama yaitu tercapai 100%, yaitu target Level 3 dan tercapai Level 3 (*Delivered*) dengan Skor "3,405. Capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian/realisasi beberapa tahun terakhir terinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.7 Capaian Nilai IACM

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2024	Pencapaian Target (%)	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif.	Nilai <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM).	3	3	100	3	3

Inspektorat Utama BNN telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan untuk indikator kinerja Nilai IACM. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Utama BNN telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan Inspektorat Utama BNN sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E (ekonomis, efisien, dan efektif), peringatan dini dan peningkatan manajemen risiko, serta perbaikan tata kelola bagi BNN.

Adapun hasil evaluasi dari BPKP atas nilai Kapabilitas APIP BNN Tahun 2024 tercantum pada tabel dibawah ini:

**Tabel III.8 Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat Utama BNN
Tahun 2024 Level 3**

No	Elemen/Topik	Evaluasi	
		Level	Skor
I	Dukungan Pengawasan/Enabler (60%)		2,205
1	Pengelolaan SDM (30%)	4	0,72
2	Praktik Profesional (30%)	3	0,54
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (10%)	3	0,225
4	Budaya dan Hubungan Organisasi (10%)	4	0,24
5	Struktur Tata Kelola (20%)	4	0,48
II	Aktivitas Pengawasan dan Kualitas Pengawasan/Delivery and Result (40%)		1,2
6	Peran dan Layanan	3	
	Simpulan Entitas	3	3,405

Analisis dan evaluasi atas realisasi indikator kinerja ini menunjukkan bahwa target tercapai sebesar 100% pada tahun 2024 yang artinya menunjukkan bahwa Inspektorat Utama BNN telah berhasil dalam meningkatkan Kapabilitas APIP dan melaksanakan aktivitas pengawasan dengan baik, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen Inspektorat Utama BNN dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan efektif dalam lingkungan kerja.

Keberhasilan pencapaian target IKP ini disebabkan adanya faktor pendukung yaitu:

- Adanya komitmen Pimpinan APIP dan seluruh pegawai dalam mengimplementasikan Kapabilitas APIP BNN di lingkungan Inspektorat Utama BNN;
- Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara Tim Pokja Kapabilitas APIP dengan semua pihak terkait dalam memenuhi data dukung setiap elemen dan topik pada Kapabilitas APIP BNN;
- Adanya dukungan dan partisipasi *stakeholder* seperti BPKP selaku pembina fungsi dalam rangka *sharing knowledge*.

IKP ini tercapai sesuai target yang direncanakan, namun terdapat beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja, yaitu:

- a. Komitmen yang kuat untuk perbaikan sistem dalam meningkatkan pengawasan intern di lingkungan Inspektorat Utama BNN belum merata, hal ini disebabkan oleh pemahaman yang belum memadai dari Pimpinan maupun pegawai tentang bagaimana meningkatkan Kapabilitas APIP BNN;
- b. Pengawasan internal sudah berjalan, namun belum diimbangi dengan terobosan/inovasi berupa pemanfaatan teknologi informasi yang efektif mengawal pencapaian kinerja utama Inspektorat Utama BNN;
- c. Kapabilitas APIP BNN di Tahun 2024 tidak mempunyai pos anggaran tersendiri yang dapat menunjang strategi guna peningkatan Kapabilitas APIP BNN sehingga ide/masukan tidak diimbangi dengan dana/anggaran yang memadai.

Upaya nyata yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target IKP ini yaitu:

- a. Menyiapkan data dukung dan menindaklanjuti *Area of Improvement* (Aoi) dari BPKP atas Kapabilitas APIP BNN;
- b. Melakukan komunikasi aktif secara berkala dengan BPKP selaku pembina fungsi dalam rangka memberikan penjaminan atas pemenuhan data dukung yang telah dilakukan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna mengidentifikasi elemen dan topik Kapabilitas APIP yang belum terlaksana;
- d. Berkolaborasi dengan Manajemen Inspektorat Utama dan pihak terkait dalam rangka meningkatkan level dan skor Kapabilitas APIP BNN.

Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya mencerminkan manajemen yang baik dalam rangka mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pengawasan internal. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Utama BNN telah mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung peningkatan kinerja terkait dengan Nilai IACM.

Adapun strategi kedepan dalam rangka meningkatkan Kapabilitas APIP BNN menuju Level 4 melalui berbagai upaya antara lain:

- a. Meningkatkan internalisasi mengenai Kapabilitas APIP berupa pengembangan kompetensi berupa diklat/MOOC/*sharing knowledge/FGD/brainstorming* untuk memastikan peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh pegawai secara merata dan berkelanjutan;
- b. Merubah pola pikir Kapabilitas APIP BNN hanya pemenuhan dokumen saja, yang seharusnya sudah kearah implementasi dan kualitas dari pengawasan intern APIP BNN;
- c. Melakukan koordinasi secara berkala dengan pembina fungsi BPKP dalam rangka memperoleh gambaran pelaksanaan pengawasan intern yang lebih berkualitas sehingga dapat meningkatkan Kapabilitas APIP BNN;
- d. Merencanakan pos anggaran khusus meningkatkan Kapabilitas APIP BNN kedalam DIPA dan PKPT Tahun 2025.

A.2 Analisis Capaian Kinerja Lainnya

1. Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi)

Kegiatan penjaminan kualitas lain yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BNN adalah Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi yang mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2021 pasca terbitnya Peraturan BPKP dimaksud, tata cara penilaian berubah hingga menghasilkan “Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi”, “Manajemen Risiko Indeks”, dan “Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi”, Hasil lengkap sebagaimana berikut :

Tabel III.10 Perbandingan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi

NO	FOKUS PENILAIAN	HASIL BASELINE 2021	HASIL BASELINE 2022	HASIL BASELINE 2023	HASIL BASELINE 2024
1	<u>Maturitas Penyelenggaraan SPIP</u>	3,065	3,137	3,291	3.361
2	<u>Manajemen Risiko Indeks</u>	2,896	3,041	3,031	3.339
3	<u>Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)</u>	2,826	3,080	3,080	3.482

Faktor yang mendukung keberhasilan dalam mencapai target capaian kinerja lainnya “Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BNN”, yaitu:

- Mengadakan pendampingan secara intensif dalam rangka memperkuat tata kelola satker.
- Koordinasi antar unit yang baik sehingga pengumpulan bukti dukung penilaian dapat lebih mudah dan cepat.

Beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja yaitu:

- Karena SPIP terintegrasi masih baru, sehingga pemahaman satker atas KKE belum maksimal.
- Aplikasi SPIP terintegrasi dengan BPKP masih belum siap, sehingga masih menggunakan KKE manual dengan aplikasi MS. EXCELL.
- Terdapat data dukung yang masih perlu dilengkapi oleh unit utama yang menjadi sampel penilaian.

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan target kinerja, yaitu:

- Memberikan pembekalan dan pendampingan kepada para penilai mandiri dan penjamin kualitas terkait format KKE SPIP terintegrasi;
- Menyamakan persepsi antar tim penjamin kualitas terkait poin-poin yang ada pada tiap unsur dan sub unsur dalam KKE;

- c. Pemenuhan data dukung menggunakan database yang dimiliki oleh unit yang dinilai, sehingga dapat mendukung upaya meminimalkan penggunaan kertas dan memudahkan melakukan silang data pada tiap poin penilaian.

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian capaian kinerja lainnya yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi SPIP terintegrasi ke unit utama;
- b. Berkoordinasi dengan BPKP terkait penilaian maturitas SPIP terintegrasi;
- c. Berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan BMN selaku koordinator pelaksanaan PM tingkat Kementerian/Lembaga.

2. Monitoring dan Audit SPBE

Pada tahun 2024 Inspektorat Utama membentuk pokja SPBE, untuk menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam proses administrasi melalui SPBE di lingkungan BNN. Hasil pelaksanaan kegiatan tim pokja tersebut, antara lain :

- a. Meningkatnya Indeks SPBE BNN pada tahun 2024 dengan nilai 3,38 (BAIK);
- b. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi Level 5;
- c. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK Level 5.

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencapaian di Tahun 2024, antara lain:

- a. Penyusunan rencana induk SPBE;
- b. Penyusunan arsitektur SPBE;
- c. Penyusunan roadmap SPBE;
- d. Pengembangan dan implementasi sistem informasi;
- e. Peningkatan kapasitas SDM dengan pelatihan SPBE dan sosialisasi SPBE;
- f. Adanya upaya keras dari tim pokja untuk tercapainya dalam pelaksanaan tugas;
- g. Evaluasi dan Pemantauan;
- h. Kerja sama dan kemitraan dengan pihak terkait.

Dalam pencapaian prestasi tersebut ditemukan Kendala yang dihadapi yaitu:

- a. Keterbatasan Anggaran;
- b. Terbatasnya Ketersediaan Infrastruktur;
- c. Terbatasnya tenaga ahli yang kompeten dalam bidang TI dan kurangnya pemahaman tentang SPBE di kalangan aparatur pemerintah dapat menghambat implementasi dan pengelolaan sistem.;
Terbatasnya koordinasi antar instansi pemerintah dan kurangnya sinergi
- d. antara berbagai sistem informasi yang ada dapat menghambat integrasi dan efisiensi SPBE;
Ancaman keamanan siber dan risiko pelanggaran privasi data menjadi
- e. perhatian utama dalam implementasi SPBE;

3. Telaah Sejawat APIP

Pada tahun 2024 Inspektorat Utama melaksanakan telaah sejawat intern dan ekstern, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Telaah Sejawat Intern

Inspektorat Utama BNN telah melaksanakan kegiatan telaah sejawat internal pada Inspektorat I, II, III dan Itwasriksus Tahun 2024 sesuai dengan Surat Perintah Inspektur Utama BNN Nomor: Sprin/199/III/IR/IR.04.05/2024/INS tanggal 15 Maret 2024 tentang Quality Control (QC) Telaah Sejawat Pada Inspektprat I.II.II, dan Itwasriksus di Lingkungan Inspektorat Utama BNN Tahun 2024 pada tanggal 13 s.d 16 Maret 2024.

Telaah sejawat internal antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia (APIP) ini dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas hasil pengawasan dan aspek penilaian intern, di bawah koordinasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Hasil telaah sejawat intern diharapkan dapat memberikan saran/rekomendasi perbaikan/peningkatan kualitas dan efektivitas praktik pengawasan intern Inspektorat Utama BNN dalam membantu pencapaian program dan tujuan Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan hasil penelaahan, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern Inspektorat I, II, III dan Itwasriksus terhadap standar.dengan rincian nilai per standar adalah sebagai berikut:

- 1) Inspektorat I nilai 86,61% dengan kategori penilaian "Baik", yaitu:
 - Standar Atribut : 87,64 %
 - Standar Pelaksanaan : 85,58 %
- 2) Inspektorat II nilai 85,36% dengan kategori penilaian "Baik", yaitu:
 - Standar Atribut : 86,56 %
 - Standar Pelaksanaan : 84,17 %
- 3) Inspektorat III nilai 87,37% dengan kategori penilaian "Baik", yaitu:
 - Standar Atribut : 87,25 %
 - Standar Pelaksanaan : 87,50 %
- 4) Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus nilai 84,14% dengan kategori penilaian "Baik", yaitu:
 - Standar Atribut : 91,26 %
 - Standar Pelaksanaan : 77,02 %

b. Telaah Sejawat Ekstern

Inspektorat Utama BNN telah melaksanakan kegiatan telaah sejawat ekstern pada Inspektorat Badan Informasi Geospasial Tahun 2024 sesuai dengan Surat Perintah Inspektur Utama BNN Nomor: Sprin/312/V/IR/IR.04.05/2024/INS pada tanggal 15 s.d. 30 Mei 2024.

Adapun tujuan kegiatan ini untuk menilai kesesuaian praktik pengawasan intern pada Inspektorat Badan Informasi Geospasial terhadap Standar AAIPi serta untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan efektivitas penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan para pemangku kepentingan terhadap APIP.

Berdasarkan hasil penelaahan, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern Inspektorat Badan Informasi Geospasial terhadap standar adalah 80,69%, dengan kategori penilaian "Baik", yaitu:

- Standar Atribut : 83,91 %
- Standar Pelaksanaan : 77,47 %

Nilai ini menunjukkan 80,69% kesesuaian praktik pengawasan intern Inspektorat Badan Informasi Geospasial dengan standar. Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit.

B. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Inspektorat Utama BNN tahun 2024 dalam rangka melaksanakan tugasnya didukung oleh APBN sesuai DIPA Tahun 2024 Satuan Kerja Inspektorat Utama Nomor: SP DIPA-066.01.1.681600/2024, Tanggal 24 November 2023 sebesar Rp9.398.101.000 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya selama T.A 2024, anggaran tersebut mengalami 2 (dua) kali revisi Automatic Adjustment Belanja BNN T.A. 2024 yakni sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : SE/5/I/SU/PR.02.01/2024/BNN tentang Automatic Adjustment Belanja Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024, tanggal 11 Januari 2024, anggaran Ittama BNN diblokir sebesar Rp630.685.000,00 (enam ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
2. Berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : B/2606/VIII/SU/PR.02.01/2024/BNN perihal Pergeseran Anggaran yang Berasal dari Automatic Adjustmen Tahun 2024, Ittama mendapatkan tambahan anggaran sebesar RP.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Realisasi Penyerapan Anggaran Inspektorat Utama BNN per 31 Desember 2024 sebesar Rp8,892,027,160 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) atau 99.62% dari anggaran tersedia sebesar Rp1 8,925,788,000 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan sisa anggaran sebesar Rp33,760,840 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau 0,90%. dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

Kode	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi			Realisasi
			Keu (Rp)	%	Sisa (Rp)	%
066.01.WA	Program Dukungan Manajemen	8.925.788.000	8.892.027.160	99.62	33.760.840	00.38
3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	8.925.788.000	8.892.027.160	99.62	33.760.840	00.38
3239.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.285.547.000	4.252.104.526	99.22.00	33.442.474	0,054
3239.EBA.962	Layanan Umum	2.663.863.000	2.642.024.732	99.18.00	21.838.268	0,056
3239.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.621.684.000	1.610.079.794	99.28.00	11.604.206	0,05
3241	Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	4.640.241.000	4.639.922.634	99.99	318.366	00.01
3241.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4.640.241.000	4.639.922.634	99.99	318.366	00.01
3241.EBD.965	Layanan Audit Internal	4.640.241.000	4.639.922.634	99.99	318.366	00.01

Tabel III.11 Rincian Anggaran dan Realisasi T.A. 2024

Selain penyerapan anggaran yang mencapai 99.62%, Inspektorat Utama juga mendapatkan peringkat pertama nilai IKPA satuan kerja tingkat pusat dengan nilai 95.61.

Berdasarkan Laporan Kinerja Inspektorat Utama BNN Tahun 2024, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan kinerja yang disampaikan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja ke depan. Beberapa rekomendasi tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi Tim Kapabilitas APIP BNN melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) substantif, bimbingan teknis, dan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) perihal penilaian Kapabilitas APIP;
2. Meningkatkan koordinasi dengan BPKP melalui media daring (online) untuk memperbaiki data dukung dan mendukung pencapaian level 4 pada Nilai IACM;
3. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan aktivitas pengawasan internal.

Dalam hal ini, rekomendasi perbaikan kinerja tersebut mencerminkan komitmen Inspektorat Utama BNN dalam terus meningkatkan kinerja mereka di masa yang akan datang. Rekomendasi ini juga menunjukkan bahwa Inspektorat Utama BNN telah melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Dalam hal ini, kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja dapat dilihat dari upaya nyata yang telah dilakukan oleh Inspektorat Utama BNN dalam meningkatkan kinerja mereka di masa yang akan datang. Meskipun terdapat beberapa capaian kinerja yang belum berhasil dicapai, upaya nyata yang telah dilakukan menunjukkan komitmen Inspektorat Utama BNN dalam meningkatkan kinerja mereka di masa yang akan datang.

Dengan demikian, hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Utama BNN dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. Hal ini dapat membantu Inspektorat Utama BNN dalam mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang.

PENUTUP

2024

INSPEKTORAT UTAMA

Laporan Kinerja Ittama BNN tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban Ittama BNN atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Hasil-hasil capaian kinerja tersebut harus disampaikan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) terkait dengan peningkatan tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif di lingkungan BNN tahun 2024.

Capaian Kinerja Ittama BNN tahun 2024 tergambar melalui capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Program “Opini BPK atas Laporan Keuangan” berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah memenuhi target dengan capaian kinerja 100%.
2. Indikator Kinerja Program “Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM” dengan target sebanyak 1 satker telah tercapai realisasinya sebanyak 3 satker atau 300%.
3. Indikator Kinerja Program “Nilai Internal Audit Capability Model (IACM) adalah 3” telah memenuhi target dengan capaian kinerja 100%.

Pada tahun 2024 Ittama BNN dalam melaksanakan tugas didukung oleh APBN sebesar 8,925,788,000 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp8,892,027,160 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) atau 99.62%. Penyerapan anggaran tersebut cukup efektif dalam mewujudkan pencapaian kinerja Ittama BNN.

Keberhasilan yang telah dicapai Ittama BNN pada tahun 2024 dari periode Rencana Strategis BNN 2020-2024 ini diharapkan akan menjadi tolok ukur dalam program pengawasan tiga tahun kedepan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel sehingga hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan selalu sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Ittama BNN pada tahun 2024 akan berusaha meningkatkan kinerja dengan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran auditor sebagai Catalyst of Change and Trusted Advisor dalam pelaksanaan pengawasan internal.
2. Adanya komunikasi yang intensif dengan unit kerja terkait tindak lanjut hasil pengawasan, sehingga permasalahan tahun lalu tidak lagi terjadi pada tahun berikutnya.
3. Adanya komunikasi yang efektif dengan unit kerja serta terbangunnya komitmen pimpinan unit kerja dalam tindak lanjut hasil pengawasan MR dan SPIP unit kerja.
4. Semakin matangnya penyelenggaraan SPIP di setiap unit kerja dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi.
5. Koordinasi yang baik dan keterlibatan yang aktif dari seluruh pegawai Inspektorat sehingga memupuk tingginya budaya peduli risiko di Inspektorat.
7. Melakukan peningkatan evaluasi SAKIP untuk mendorong peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan BNN.
8. Melakukan pembangunan Zona Integritas Ittama BNN.
9. Melakukan asistensi serta monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas di lingkungan BNN menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
10. Meningkatkan mutu audit dengan audit berbasis risiko.
11. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai secara berkala sesuai dengan tugas dan fungsi Ittama BNN.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Ittama BNN tahun 2024 disajikan guna mencapai tujuan manajemen dalam rangka pertanggungjawaban peningkatan kinerja instansi.

Jakarta, Januari 2025
Inspektur Utama
Badan Narkotika Nasional

ttd.

Drs. Wahyono, M.H., CFA., CGCAE.

1. Meningkatkan peran auditor sebagai Catalyst of Change and Trusted Advisor dalam pelaksanaan pengawasan internal.
2. Adanya komunikasi yang intensif dengan unit kerja terkait tindak lanjut hasil pengawasan, sehingga permasalahan tahun lalu tidak lagi terjadi pada tahun berikutnya.
3. Adanya komunikasi yang efektif dengan unit kerja serta terbangunnya komitmen pimpinan unit kerja dalam tindak lanjut hasil pengawasan MR dan SPIP unit kerja.
4. Semakin matangnya penyelenggaraan SPIP di setiap unit kerja dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi.
5. Koordinasi yang baik dan keterlibatan yang aktif dari seluruh pegawai Inspektorat sehingga memupuk tingginya budaya peduli risiko di Inspektorat.
7. Melakukan peningkatan evaluasi SAKIP untuk mendorong peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan BNN.
8. Melakukan pembangunan Zona Integritas Ittama BNN.
9. Melakukan asistensi serta monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas di lingkungan BNN menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
10. Meningkatkan mutu audit dengan audit berbasis risiko.
11. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai secara berkala sesuai dengan tugas dan fungsi Ittama BNN.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Ittama BNN tahun 2023 disajikan guna mencapai tujuan manajemen dalam rangka pertanggungjawaban peningkatan kinerja instansi.

Jakarta, Januari 2025
Inspektur Utama
Badan Narkotika Nasional

ttd.

Drs. Wahyono, M.H., CFA., CGCAE.



Inspektorat Utama



TERIMA KASIH

2024

MORE INFO

www.bnn.go.id/ittama

CALL US

+62-21 80871567

